

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN
SUMENEP**

***POLICY POLICY EVALUATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 7
OF 2013 CONCERNING THE MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION
OF 12 YEAR COMPULSORY EDUCATION***

IN SUMENEP DISTRICT

Oleh:

Nunung Hariyanti Nova¹ , Ida Syafriyani²
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, Universitas Wiraraja
Madura

E-mail: nununghnn09@gmail.com idafisipunija@gmail.com

ABSTRACT

This research evaluates the 12-year compulsory education program policy in Sumenep Regency. Education is an important aspect of community welfare which plays a role in improving the quality of life. Every citizen is obliged to attend basic education and the government finances it. This statement is in accordance with paragraphs 1 and 2 of the 1945 Constitution, article 31. The school dropout rate in Sumenep Regency is ranked second in East Java. This research focuses on the evaluation function theory (Dunn and Ripley) which contains 4 things, namely; Explanation, Compliance, Audit and Accounting. This research uses descriptive qualitative methods, analytical techniques used to collect data through observation, interviews, documentation. The location of the research was the Sumenep Regency Education Office. Based on the research results, the implementation of the 12-year compulsory education policy in Sumenep Regency has been carried out in accordance with the provisions of the policy and is proven by a decrease in the school dropout rate in the 2023-2024 academic year as a form of implementation that has been realized and has truly reached the target group. aimed. This research shows that the implementation of the 12-year compulsory education program policy has been implemented since 2013 in accordance with Sumenep Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Management and Implementation of Education with various efforts to support the success of this policy.

Keywords: Education, Compulsory Education, Policy Evaluation

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah yang membiayainya. Pernyataan tersebut sesuai dengan ayat 1 dan 2 UUD 1945 pasal 31. Angka putus sekolah di Kabupaten Sumenep termasuk pada peringkat kedua di Jawa Timur. Penelitian ini berfokus pada teori fungsi evaluasi (Dunn and Ripley) yang berisikan 4 hal yakni; Eksplanasi, Kepatuhan, Audit, dan Akunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik analisis yang digunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep telah terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan dan dibuktikan dengan adanya penurunan angka putus sekolah pada tahun akademik 2023-2024 sebagai bentuk pelaksanaannya sudah terealisasi dan benar-benar sampai pada sasaran kelompok yang dituju. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun ini sudah dilaksanakan sejak 2013 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan berbagai upaya dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Kata Kunci: Pendidikan, Wajib Belajar, Evaluasi Kebijakan

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Dengan Pendidikan masyarakat mampu menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir. Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, yang sangat berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri

dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan isi pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah daerah. Kebijakan program wajib belajar 12 tahun merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengkonsep 3 hal yang diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai alat untuk mengukur tingkat pembangunan suatu negara dengan mempertimbangkan 3 aspek yakni kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup. Dari ketiga aspek tersebut Pendidikan adalah salah satunya adalah aspek yang cukup penting pada pembangunan suatu negara karena semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin baik pula kondisi suatu negara tersebut. Dengan adanya pendidikan negara tidak akan tertinggal oleh negara lain. Pendidikan merupakan hal penting dalam pengupayaan membina anak didik menjadi individu yang lebih baik berdaya, kreatif, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan dirancang secara terorganisir, berencana, dan berkelanjutan yang dalam artian bahwa dasar Pendidikan adalah dilakukan dengan penuh kesadaran, terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Kabupaten Sumenep menjadi kabupaten yang saat ini juga menerapkan program kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 Kecamatan. 19

Kecamatan daratan dan 8 Kecamatan kepulauan. Masing - masing Kecamatan memiliki jumlah sekolah yang tidak sama. Menurut data kemendikbud Kabupaten Sumenep jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 657 sekolah. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 202 sekolah. Dan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 83 sekolah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori fungsi evaluasi menurut Dunn and Ripley sebagai tolak ukur keberhasilan evaluasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep yang berisikan empat hal yakni; Eksplanasi, Kepatuhan, Auditing, dan Akunting.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah Bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Sumenep?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 di Kabupaten Sumenep

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang dipelajari di jenjang perkuliahan

b. Manfaat Praktis

a. Kepada Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan serta pengalaman mengenai evaluasi pada penerapan program kebijakan wajib belajar 12 tahun dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumenep.

b. Bagi Akademisi

Memberikan manfaat bagi peneliti lain mengenai evaluasi pada penerapan program kebijakan wajib belajar 12 tahun dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten

Sumenep serta memberikan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya

c. Bagi instansi terkait

Memberikan manfaat serta pembelajaran sekaligus masukan serta bahan evaluasi bagi lembaga tentang sejauh mana pemberlakuan program kebijakan wajib belajar 12 tahun dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumenep.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan supaya penulisan penelitian ini dapat terstruktur secara sistematika dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga dapat dipaparkan secara baik dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

Pada Bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Pada Bab II yaitu Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, berisikan tentang tulisan kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis untuk dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang

dipakai penulis di peroleh dari jurnal-jurnal ilmiah serta penelitian Skripsi. Pada bagian ini juga mengulas Teori yang relevan dipakai sebagai pedoman dalam penelitian ini.

Pada Bab III metedologi penelitian yang berisi tentang metedologi penelitian yang digunakan penulis yakni dengan metode kualitatif. Pada bagian ini pula dipaparkarkan mengenai fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data.

Pada Bab IV gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang dilakukan dengan observasi agar sistematis, bab gambaran umum objek penelitian meliputi: Profil singkat, Visi dan Misi, Stuktur organisasi, Tugas dan fungsi.

Pada BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menguraikan dan menjelaskan data dari hasil penelitian dan membahas tentang data dari penelitian yang di dapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

Pada BAB VI Kesimpulan dan Saran memaparkan tentang kesimpulan dari

hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti dan saran yang diberikan oleh peneliti.

2. TINJAUAN TEORITIS

Beberapa tahun terakhir banyak penelitian telah dilakukan mengenai evaluasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun. (Dzakiyah Ardiliya Putri, 2019) menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan wajib belajar 12 tahun hasil tahapan intervensi, tahapan determinana, dan hasil tahapan dampak, terdapat banyak kekurangan dari segi perencanaan APBD yang masih “pas-passan,” kekurangan gedung sekolah, kekurangan guru, serta bantuan pendidikan yang dananya masih sedikit. Untuk dampak Kota Bekasi sudah mempunyai APK dan APM yang tinggi dikarenakan terpengaruh sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta. Direkomendasikan pemerintahKota Bekasi menambah APBD pendidikan, penambahan gedung sekolah dan penambahan dana bantuan sekolah. Agar hasil dari penerapan kebijakan wajib belajar 12 tahun lebih baik. Sedangkan (Yuliwati pada tahun, 2022) bahwa belum meratanya akses pendidikan, daya jangkau sekolah, dan transportasi umu yang minim menjadi

penyebab wajib belajar dua belas tahun belum tercapai. Kultur budaya yang masih sangat tradisonal sehingga sulit untuk mengembangkan dan membudayakan teknologi digital sebagai alat utama dalam pelaksanaan pendidikan, dan kesadaran orangtua serta masyarakat akan pentingnya pendidikan masih harus dibangkitkan kembali secara sosialisasi oleh pemangku kepentingan. Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) admintrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasrkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Friedrich (dalam Thoha, 2008:107) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Briyant and White (1987:191) mengatakan bahwa evaluasi merupakan usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik analisis yang digunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Dengan subyek penelitian yakni; informan kunci Bapak Budi Sulistyو selaku Kepala Dinas Cabang Pendidikan Kabupaten Sumenep, Informan Utama Ibu Fatimah Umar selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dan informan pendukung yaitu 3 sekolah implementator (Kepala Sekolah SDN KARANGANYAR, Kepala Sekolah SMPN 4 Sumenep, dan Kepala Sekolah SMAN 1 Kalianget).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan lokus penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, terkait dengan fokus kajian tentang Evaluasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep mengacu pada teori fungsi Evaluasi Dunn and Ripley bahwa fungsi evaluasi dilakukan pada kebijakan dengan cara: eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting.

Eksplanasi

gambaran umum kebijakan, faktor-faktor yang menjadi dasar pada kebijakan, dan juga keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat pada kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh beberapa informan diatas bahwa kebijakan program wajib belajar ini perlu didukung dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Keduanya perlu keselarasan agar tujuan dari kebijakan program wajib belajar 12 tahun tersebut tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pada kebijakan ini memang semua pihak merujuk pada Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Kepatuhan

Kepatuhan pada fungsi evaluasi untuk mengetahui tindakan para pelaku dalam melaksanakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep perlu mengevaluasi apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan guna tercapainya tujuan

yang hendak dicapai. Seperti halnya evaluasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep, dengan adanya kepatuhan pada pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep maka dapat diketahui tindakan para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kebijakan program tersebut. Sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep.

Pada kebijakan ini menunjukkan bahwa semua pihak merujuk pada Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pedoman pada pelaksanaannya. Adapun beberapa kegiatan dalam rangka mendorong keberhasilan kebijakan dan juga sebagai bentuk kepatuhan dalam kebijakan program wajib belajar 12 tahun yang implementasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Sosialisasi, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Penyuluhan

bimbingan teknis ini merupakan kegiatan yang didalamnya berisi tentang pelatihan pelatihan teknis dalam meningkatkan kompetensi terkait kurikulum pembelajaran yang digunakan sekolah- sekolah di Kabupaten Sumenep. Diharapkan dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa siswi lewat guru untuk mengajari di sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep melakukan kegiatan ini secara rutin setiap tahunnya, guna mendukung proses pembelajaran.

Audit

Audit sebagai tolak ukur apakah output pada kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep benar-benar sampai pada kelompok sasaran kebijakan tersebut. Atau bahkan terdapat penyimpangan di dalamnya. Seperti halnya evaluasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep maka audit digunakan sebagaimana untuk mengetahui output atau kebermanfaatan

kebijakan program wajib belajar 12 tahun ini kepada kelompok sasaran. Sehingga dengan audit dapat dilihat pula keberhasilan maupun penyimpangan

yang terjadi pada kebijakan tersebut. Output pada kebijakan ini dapat dilihat sejauh mana kelompok yang dituju dapat merasakan kebermanfaatannya maka sebagai tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

akunting

Akunting maka evaluasi pada kebijakan dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. Seperti halnya evaluasi pada kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep, akunting disini menilai dan melihat apakah akibat sosial ekonomi dari kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep lebih baik dari sebelumnya, artinya dengan dilaksanakannya kebijakan ini Kabupaten Sumenep dapat merasakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

5. PENUTUP Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai evaluasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep dengan berlandaskan teori Fungsi Evaluasi William Dunn And Ripley yakni: eksplanasi, kepatuhan, audit, dan

akunting. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun ini sudah dilaksanakan sejak 2013 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang melibatkan beberapa Dinas terkait. Pada pelaksanaannya output pada kebijakan ini dinilai sampai pada kelompok sasaran yang dituju dengan didukung oleh penganggaran yang diberikan pemerintah. Baik sarana dan prasana, serta bantuan sosial seperti PIP dan seragam gratis. Sehingga kebermanfaatan pada kebijakan ini benar-benar sampai pada sasaran kebijakan. Adapun dampak sosial ekonomi yang didapat dengan adanya pelaksanaan kebijakan program wajib belajar di Kabupaten Sumenep yakni meningkatnya

persentase angka lanjut sekolah, menurunnya angka usia dini, dan juga banyak masyarakat Sumenep yang tidak berprofesi sebagai tenaga kasar.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Eksplanasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian pada skripsi ini, perlu melibatkan stakeholder seperti Dewan Pendidikan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Komite Sekolah dalam pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep berdasarkan pada Perbup no 7 tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

2. Kepatuhan, disarankan kepada seluruh bagian pihak yang ikut andil dalam kebijakan program wajib belajar

12 tahun ini seperti sekolah-sekolah implementator di Kabupaten Sumenep diharapkan untuk selalu melaporkan data siswa-siswi baik persemester maupun perangkatan

tahun secara rutin ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagai bentuk pertanggungjawaban/Amanah yang tertera dalam perbup no 7 tahun 2013. sehingga dapat dilihat serta dievaluasi jika terdapat kekurangan yang terjadi.

3. Audit, diharapkan angka putus sekolah di Kabupaten Sumenep terus dan akan mengalami penurunan yang berkolerasi positif terhadap angka kemiskinan

4. Akunting, berdasarkan fungsi audit maka pada fungsi akunting ini diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumenep juga dapat melakukan transparansi penggunaan anggaran yang dapat berdampak status ekonomi dan taraf hidup masyarakat lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

BPS book. (2017). Indeks pembangunan manusia kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016. 25.
[https://papua.bps.go.id/pressrelease/2017/05/02/238/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-](https://papua.bps.go.id/pressrelease/2017/05/02/238/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-2016.html)

papua-2016.html
Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1), 43–50. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2765>.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008. (2008). *Wajib Belajar*, 49, 69–73.
PERKAB. (2021). *Data Sekolah Kab.* <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/160200>
Setiono, B. A. (2019). Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 9(2), 179–185. <https://doi.org/10.30649/japk.v9i2.36>
Setiyawan. (2013). Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun Di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
Suaib, M. R. (2016). *PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK*.
Sumenep, B. (2013). *Pemerintah kabupaten sumenep*. 1–26.
Yuliwati, Y. (2022). *Wajib Belajar 12 Tahun Dalam Realita di Wilayah Kabupaten Bogor*. Wiyata Dharma : *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 110–118.
Dharma, W., Penelitian, J., Pendidikan, E., & Yuliwati, Y.

(2022). Wajib belajar
12 tahun dalam realita di wilayah
Kabupaten Bogor. 10(2), 110–
118.
[https://doi.org/10.30738/wd.v10i
2.14032](https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032)

Pusat, B., Kabupaten, S., & Timur,
T. J. (2016). INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA

Dinas Pendidikan, D. I., Bekasi,
K., Diajukan, S., Fakultas, K.,

Tarbiyah, I., Keguruan, D.,
Memenuhi, U., Syarat, S. S.,
Gelar, M., Pendidikan, S., &
Manajemen Pendidikan, J. (n.d.).
EVALUASI KEBIJAKAN
WAJIB BELAJAR DUA BELAS
TAHUN.

Sugiyono. (2017). Metode
Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,
dan Kombinasi. Bandung :
Alfabert.